Kendala-Kendala Realisasi Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) : Studi di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

M.Hidayatul Halim

Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Andalas

Email: ajhalim3@gmail.com

Abstract : *One of the priority programs mandated by Law No. 6/2014 on traditional villages or villages in Indonesia is the establishment of BUMDes. BUMDes or for West Sumatra Province is called BUMNag, is a business entity formed by the village government which aims to improve the economy in the village and can take advantage of the potential that exists in the village, so as to improve the welfare of the people in the village. However, not all villages have been able to establish BUMNag, one of which is Nagari Padang Tarok. Therefore, researchers want to see what are the obstacles faced by Nagari Padang Tarok, so that BUMNag has not yet been established. This research was conducted with a qualitative approach with a descriptive type. Research informants were selected using purposive sampling technique and in data collection used in-depth interviews. The results of this study found the obstacles faced by the Padang Tarok Nagari Government in establishing BUMNag, namely that the village government prioritized physical development, difficulty finding business units and lack of human resources. The focus of the village government in physical development in Nagari Padang Tarok has a positive impact on the community, road access is getting better between jorong and another, irrigation in the fields is starting to run smoothly, health and education facilities are starting to be adequate.*

Keywords: *BUMNag and Constraints in establishing BUMNag.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Di Indonesia terdapat 74.754 desa atau nagari. Desa atau nagari tersebut berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan cara melakukan pembangunan pedesaan (Chozin, dkk, 2010:69).

Untuk meningkatkan pembangunan desa di Indonesia, pemerintah menambah sumber pendapatan desa atau disebut juga dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. yang mana dana desa digunakan untuk meningkatkan pembangunan yang dikelola berbasis kawasan pedesaan (*rural based development*) yang meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan kelembagaan.

Dana desa pertama kali ditransfer ke desa pada tahun 2015 yang mana jumlahnya menurut UU berjumlah 10% dari APBN. Untuk tahun 2015 dana yang ditransfer ke desa berjumlah Rp. 20.766 triliun, meningkat tahun 2016 Rp. 47 triliun, dan meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 triliun. Untuk provinsi Sumatera Barat jumlah dana desa yang didapat meningkat setiap tahunnya yang mana pada tahun 2015 setiap nagari mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 300 juta/Nagari, meningkat tahun 2016 Rp. 600 juta/Nagari, dan meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 Rp. 800 juta/Nagari.

Salah satu program prioritas adanya dana desa yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan keuangan yang mana dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35) adalah lembaga usaha yang dikelola masyarakat desa atau pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMDes harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMDes bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Sumatera Barat memakai sistem Nagari untuk daerah administratif terendah maka program BUMdes di Sumatera Barat disebut juga BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari). Program BUMDes telah dilaksanakan diberbagai desa di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki 345 BUMNag dari 923 nagari yang ada. Menurut data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Agam dari 82 Nagari di Kabupaten Agam terdapat 35 Nagari yang sudah memiliki BUMNag. Dari 35 BUMNag diantaranya ada 4 nagari yang telah

memiliki BUMNag semenjak tahun 2016. Nagari tersebut ialah Nagari Lawang Kecamatan Matur, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, dan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung (LPMN Agam, 2017).

Lubuk Basung Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bergerak dibidang pertanian dan perikanan dimana tata kelola BUMNag tersebut dilaksanakan oleh Nagari Lubuk Basung. Lubuk Basung Mandiri berdiri pada tahun 2016. Pada awal berdirinya, BUMNag Lubuk Basung mandiri hanya bergerak pada sektor pertanian dengan subsektor penanaman jagung dan pada saat ini BUMNag Lubuk Basung mandiri telah mengembangkan usaha yang bergerak di sektor perikanan.

Selain Nagari Lubuk Basung, Nagari Manggopoh yang berada di Kecamatan Lubuk Basung juga telah memiliki BUMNag. Siti Manggopoh adalah BUMNag yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh yang bergerak di sektor perdagangan. Siti Mart sebagai BUMNag Nagari Manggopoh, menjual barang harian yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Nagari Manggopoh.

Koto Tinggi Kecamatan Baso merupakan Nagari yang termasuk satu dari empat Nagari yang memiliki BUMNag. Nagari Koto Tinggi ini memiliki BUMNag yang bernama Koto Tinggi Sakato yang bergerak di bidang simpan pinjam dan usaha *fotocopy*.

Lawang Segar adalah sebuah outlet yang menjual olahan masyarakat dan produksi lokal Nagari Lawang. Outlet ini adalah BUMNag yang dimiliki Nagari Lawang. Outlet Lawang Segar didirikan untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Lawang.

Berdasarkan jumlah BUMNag yang ada di Kabupaten Agam salah satu nagari yang belum memiliki BUMNag adalah Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Nagari Padang Tarok guna mengidentifikasi kendala-kendala belum terealisasinya pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok setelah 4 tahun berjalan dana desa.

Kajian Sosiologis

Penelitian ini memakai konsep kapital sosial. Menurut James Coleman dalam Damsar dan Indrayani (2009:209-210), member batasan kapital sosial sebagai “seperangkat sumber daya yang inheren dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial seorang akan”. Coleman menambahkan bahwa kapital sosial merupakan “aspek dari struktur sosial serta tindakan individu dalam struktur sosial”.

Dari sekian banyak definisi kapital sosial menurut para ahli, penelitian ini menggunakan konsep kapital sosial yang dikemukakan oleh Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, kapital sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya (Lawang, 2005:217).

Definisi ini perlu dirinci perkomponen menurut perspektif sosiologis (Lawang: 2005:217-218):

1. Kekuatan sosial menunjuk pada semua mekanisme yang sudah dan akan dikembangkan oleh suatu komunitas dan mempertahankan hidupnya. Yang menyusun kekuatan itu adalah individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang digunakannya dalam menghadapi semua masalah sosial yang dihadapi.
2. Kekuatan-kekuatan sosial sebagai kapital sosial dapat terbatas pada komunitas itu saja yang dilihat sebagai "*bounded social capital*", atau kalau sudah dikaitkan dalam bentuk jaringan dengan kapital sosialmezo dan makro dapat disebut sebagai "*brindging social capital*". kalau satuan pengamatan dan analisisnya adalah mezo sebagai "*bounded*", maka yang makro adalah "*brindging*".
3. Kapital sosial itu pada dasarnya merupakan konstruksi sosial. Artinya, melalui interaksi sosial individu-individu membangun kekuatan sosial (kolektif) bersama untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi. Dalam membangun kekuatan bersama ini, prinsip kegunaan memegang peranan penting, mulai dari yang paling menguntungkan menurut penilaian individu, sampai dengan yang paling kurang. Karena kapital sosial merupakan konstruksi sosial yang pada dasarnya bersifat utilitaristik, maka ada unsur kewajiban, norma dan sanksi didalamnya.
4. Kapital sosial dalam pengertian ini merupakan alat yang dikonstruksikan oleh individu-individu dalam mencapai tujuan bersama.
5. Ada kemungkinan kapital sosial dominan dalam mengatasi suatu masalah sosial. Tetapi mungkin juga tidak seberapa pentingnya. Namun prinsip sinergi tetap berlaku agar kapital sosial dapat digunakan sebagai kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan menurut Manikam (2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk dalam upaya memperkuat perekonomian desa.

BUMDes menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Didirikan antara lain dalam rangka Peningkatan Asli Desa (PADesa). Jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa lain untuk mendirikan badan usaha ini. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Dismaping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditujuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen.

Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang menjabarkan tentang penerapan BUMDes secara umum yang dapat dikategorikan berhasil dalam pelaksanaannya meskipun terdapat aspek-aspek yang diperbaiki dalam rangka program BUMDes yang lebih baik seperti payung hukum, sumber daya manusia, pengelolaan administratif dan sebagainya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Benny Ferdianto yang berjudul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016 menjabarkan bahwa dengan adanya keberadaan BUMDes di Tiyuh Candra Tulang Bawang tersebut menimbulkan aspek positif dari aspek ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Aspek positif yang ditimbulkan yaitu meningkatnya pendapatan asli desa dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana kapital sosial yang dilakukan nagari dalam pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menanalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13)

Pendekatan ini dipilih, karena pendekatan penelitian kualitatif mampu menjelaskan secara detail apa yang menjadi kendala-kendala dalam realisasi pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok. Dengan penelitian kualitatif, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci berupa informasi yang diberikan informan melalui kata-kata pada saat wawancara, dokumen dan masyarakat sebagai pengamat mengenai keadaan serta bukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini sehingga mampu mendapatkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data-data yang diperoleh dilapangan, foto, catatan, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2010:6).

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Pemilihan informan bertujuan untuk menjangking sebanyak-banyaknya data dan informasi yang bermanfaat bagi bahan penelitian nantinya. Oleh sebab itu orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini

adalah orang-orang yang paham segala situasi, kondisi lokasi penelitian dan menguasai penelitian ini.

Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari wali nagari, sekretaris nagari, tenaga pendamping dana desa, tim perumus BUMNag, tokoh masyarakat, pemilik lahan atau pengelola jalur sepeda gunung.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rencana Pendirian BUMDes di Tarok

Proses awal pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok dimulai pada tahun 2016. Dimana pemerintah nagari mulai merencanakan untuk mendirikan BUMNag, dengan menginisiasi untuk mengundang lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat yang ada di Nagari Padang Tarok untuk membahas pembentukan BUMNag, pertemuan ini dilaksanakan di ruang pertemuan balai nagari pada bulan Juli tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Bundo Kanduang dan perwakilan masyarakat tiap Jorong dari 7 Jorong yang ada di Nagari Padang Tarok untuk meminta pandangannya untuk mendirikan BUMNag.

Tujuan diadakannya pertemuan ini pemerintah nagari ingin melihat dan meminta pandangan lembaga-lembaga nagari maupun tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat nagari Padang Tarok guna membahas tentang wacana pemerintah nagari Padang Tarok untuk mendirikan BUMNag. Dalam pertemuan tersebut diawali dengan Pemerintah nagari menjelaskan tujuan pendirian BUMNag serta manfaat dari pendirian BUMNag kepada semua pihak yang mengikuti pertemuan tersebut.

Setelah memaparkan secara detail tujuan serta manfaat dari BUMNag pemerintahan nagari meminta pandangan dari semua yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk menanggapi dan memberikan saran terhadap pendirian BUMNag. Dalam sesi ini pemerintah nagari cukup banyak mendapatkan saran baik itu teknis pendirian BUMNag, unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMNag dan Siapa yang mengelola BUMNag nantinya.

2. Kendala dalam mendirikan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan di Nagari Padang Tarok mengenai kendala-kendala realisasi pendirian BUMNag Padang Tarok, penulis mendapatkan informasi mengenai kendala yang ada pada Nagari Padang Tarok dalam mendirikan BUMNag.

a. Pemerintah Nagari Fokus pada Pembangunan Fisik

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, salah satu kendala dalam pendirian BUMNag adalah pemerintah nagari fokus pada pembangunan fisik. Kondisi Nagari Padang Tarok yang secara geografis cukup luas serta masih kurang meratanya pembangunan fisik, maka dari itu dengan adanya momentum dana desa ini pemerintahan Nagari Padang Tarok memanfaatkan dana yang ada itu meningkatkan pembangunan yang ada agar dana yang banyak untuk dikelola itu terserap dan mencapai manfaatnya.

Fokusnya pemerintahan nagari dalam pembangunan fisik bukan tanpa alasan, disamping pembangunan yang belum merata diseluruh nagari pembangunan fisik yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan agar angka serapan anggaran tinggi dan tidak banyak SILPA pada tahun berikutnya, karena jika pemerintah Nagari Padang Tarok memiliki banyak SILPA maka akan mengurangi pendapatan nagari pada tahun berikutnya. Berdasarkan data nagari tahun 2017 dengan adanya dana desa ditambah lagi sumber dana yang lain seperti pendapatan asli nagari, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah alokasi dana nagari, bantuan keuangan provinsi dan pendapatan lain-lain nagari mengelola dana diatas Rp. 1.975.332.210. Dari dana tersebut pemerintah nagari 4 tahun terakhir harus berjuang agar dana tersebut harus digunakan agar masyarakat nagari merasakan manfaatnya, seperti amanat UU dan pemerintah pusat dan pemerintah nagari sebagai pengguna anggaran dapat melaksanakan dengan baik.

b. Kendala Menemukan Unit Usaha

Dari pernyataan informan diatas usaha pemerintah nagari dan tim perumus dalam pembentukan BUMNag terkendala didalam penentuan unit usaha yang akan dijadikan program BUMNag. BUMNag didirikan untuk menunjang pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat bukan untuk menyaingi usaha masyarakat nagari, wilayah Nagari Padang tarok didominasi oleh lahan yang digunakan warga untuk pertanian atau perkebunan, kalau unit usaha BUMNag bergerak di bidang pertanian dan perkebunan nantinya akan mengganggu pendapatan para petani dan juga petani yang sudah termasuk kedalam kelompok tani, tujuan dari kelompok tani juga untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian selain itu, mencari lahan untuk lahan pertanian juga susah karena sebagian besar tanah yang ada di Nagari Padang Tarok merupakan tanah ulayat yang tidak bisa diperjual belikan atau dihibahkan.

Mendirikan unit usaha dalam kegiatan ekonomi seperti membuka usaha *mini market*, foto copy, dan jenis usaha lainnya juga tidak bisa karena nantinya akan melemahkan pendapatan masyarakat yang mempunyai kedai-kedai kecil, masyarakat akan lebih cenderung berbelanja ke *mini market* ketimbang ke kedai karena *mini market* lebih lengkap produk yang dijual ketimbang di kedai.

c. Pembebasan Lahan

Nagari Padang Tarok mempunyai tempat wisata yang berupa jalur sepeda Gunung yang berada di Jorong Bukik Apik. Jalur sepeda gunung ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pada tanggal 21 Agustus 2016 pengelola mengadakan *event* bertaraf nasional yang diikuti peserta dari berbagai provinsi, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat dan lain sebagainya. Menurut komunitas sepeda gunung dan pengelola, jalur sepeda gunung ini juga merupakan jalur terekstrim di pulau Sumatera setelah jalur yang ada di Bangka Belitung, karena itu banyak komunitas sepeda gunung dari berbagai daerah mencoba jalur tersebut setiap akhir pekan.

Alasan inilah yang membuat pemerintah nagari dan tim perumus ingin menjadikan jalur sepeda gunung tersebut sebagai program BUMNag di Nagari Padang Tarok. Karena dengan pengelolaan yang lebih tepat dan bantuan dana dari pemerintah jalur sepeda ini nantinya akan lebih maju dan juga *event* seperti yang sudah dilakukan sebelumnya akan lebih sering diadakan guna untuk

memperkenalkan Nagari Padang Tarok ke masyarakat luar dan juga membantu perekonomian masyarakat. Akan tetapi usaha pemerintah dalam menjadikan jalur sepeda ini sebagai unit usaha BUMNag terkendala dalam pembebasan lahan.

Menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 tentang lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program BUMNag harus dimiliki nagari sendiri atau sekurang-kurangnya dapat disewa oleh nagari. Namun, kenyataannya lahan jalur sepeda gunung ini merupakan tanah ulayat yang tidak dapat dijual belikan. Sebenarnya ini bisa disiasati dengan cara menyewa tanah ini, tapi pihak dari pemilik tanah tidak mau melepaskan pengelolaan lahan ini untuk dijadikan BUMNag karena mereka takut nantinya nagari memegang penuh atas pengelolaan jalur sepeda gunung ini nantinya. Dan juga mereka beranggapan tanpa bantuan pemerintah pun mereka dapat mengelola jalur ini secara mandiri mulai dari pembukaan lahan sampai membangun jalur ini sampai saat ini. Mengadakan *event* bertaraf nasional pun mereka sanggup mengangkatnya dengan bekerjasama dengan komunitas sepeda yang ada di Padang Tarok. Oleh sebab itu, BUMNag sampai saat ini tidak dapat didirikan karena lahan tidak bisa dimiliki atau di sewa oleh pihak nagari.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Berdasarkan wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan beberapa informan dari pemerintahan Nagari Padang Tarok, di samping kendala kurang maksimalnya tim perumus BUMNag, sulit menentukan unit usaha satu lagi yang menjadi kendala dalam mendirikan BUMNag di Nagari Padang tarok yaitu kurangnya sumber daya manusia. Dalam mendirikan BUMNag salah satu faktor terpenting itu adalah adanya seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang administrasi, manajerial, memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menggerakkan orang lain. Empat indikator yang dijelaskan itulah yang bisa menjadi ujung tombak untuk mendirikan sekaligus menjalankan BUMNag, tetapi di Nagari Padang Tarok tergolong susah menemukan orang yang memiliki 4 kriteria tersebut, jikapun ada yang memiliki kriteria tersebut orang itu sudah mempunyai pekerjaan atau sudah merantau. Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala kenapa BUMNag belum berdiri.

Pemerintahan Nagari Padang Tarok beralasan kenapa untuk mengelola BUMNag mencari orang yang memiliki ilmu administrasi, karena pada dasarnya dalam menjalankan BUMNag itu harus bisa membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang diberikan pemerintahan nagari. Menurut informan yang penulis wawancarai meskipun dana nanti diserahkan ke pengelola BUMNag tidak bisa digunakan seenaknya saja harus bisa dikelola dengan baik dan memiliki laporan yang nantinya laporan keuangan itu juga akan diberikan ke pemerintah pusat sebagai pertanggung jawaban penggunaan dana desa di nagari padang tarok. Apabila laporan tidak dimiliki akan menimbulkan masalah dan mempengaruhi pendapatan nagari untuk tahun selanjutnya.

3. Landasan Hukum BUMDes

Setelah disahkan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah dalam hal ini kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan program prioritas dalam pembangunan di desa ataupun desa adat yang ada di Indonesia. Untuk menjalankan UU diatas diterjemahkan Peraturan

pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Teknis pelaksanaan penggunaan dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Untuk melaksanakan program desa diatur oleh Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Peraturan tersebut di terjemahkan juga dalam bentuk Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari. Salah satu program prioritas yang diharapkan ada di setiap desa atau Nagari di Sumatera Barat yaitu BUMNag.

Dengan adanya BUMNag pemerintahan pusat berharap, desa atau nagari dapat menciptakan kemandirian dengan memanfaatkan potensi perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta dikelola dengan ciri khas serta karakteristik daerah masing-masing agar menciptakan peluang ekonomi baru di nagari. Sehingga, dengan nagari mempunyai sumber pendapatan sendiri maka nagari diharapkan naik kelas menjadi nagari mandiri yang memiliki sumber pendanaan sendiri untuk menjalankan pemerintahan, agar mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk mendukung pelaksanaan BUMNag agar tujuannya dapat tercapai pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri yaitu Permendes No 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Adapun peraturan ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi pemerintah desa atau dalam hal ini pemerintah nagari dalam mendirikan dan melaksanakan serta mengelola BUMNag. Sehingga, dengan adanya peraturan menteri mengenai BUMNag ini diharapkan pemerintahan nagari bisa berpedoman dalam menjalankan BUMNag, agar tujuan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian di nagari tercapai.

Namun pada praktiknya belum semua nagari menjadikan Permendagri 113 tahun 2014, Permendes No 4 tahun 2015, Perbup No 8 tahun 2017 sebagai pedoman dalam menjalankan program BUMNag. Salah satunya Nagari Padang Tarok tempat penulis lakukan penelitian terkait kendala-kendala dalam mendirikan BUMNag. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan terkait kendala pemerintahan nagari dalam mendirikan BUMNag yaitu ada 3 point penting yaitu pemerintah nagari fokus pembangunan fisik, sulit menemukan unit usaha dan kurangnya sumberdaya manusia.

Berdasarkan tiga poin kendala yang dijelaskan diatas peneliti melihat pemerintah nagari mengetahui adanya peraturan menteri terkait pedoman dalam mendirikan BUMNag, namun belum serius untuk mendirikan BUMNag dikarenakan pemerintah nagari lebih terfokus kepada pembangunan fisik. Peneliti dalam hal ini melihat Pemerintah Nagari Padang Tarok masih mengartikan pembangunan itu sebatas membangun fisik seperti jalan dan irigasi serta lainnya. Jika dilihat lebih jauh Permendes No 4 tahun 2015 tentang BUMDes pada pasal 1 dapat diartikan bahwa BUMDes atau BUMNag diartikan sebagai pembangunan jangka panjang dalam hal ini membangun fondasi perekonomian nagari yang mandiri berdasarkan potensi yang ada serta dikelola berskala lokal, sehingga akan dirasakan manfaatnya jangka panjang oleh masyarakat. Namun pada dasarnya

pemerintahan nagari belum melihat dengan teliti, sehingga hanya melakukan pembangunan fisik karena lebih cenderung mudah dilakukan dan angka serapan dana lebih tinggi.

Kendala selanjutnya dalam mendirikan BUMNag yaitu sulit menentukan unit usaha dan kurangnya sumberdaya manusia. Jika melihat Permendes No 4 tahun 2015 dalam menentukan unit usaha seharusnya pemerintahan nagari harus melihat dulu apa tujuannya BUMNag. Jika dilihat pada pasal 2 permendes No 4 tahun 2015, pendirian BUMNag sebagai menampung semua kegiatan dibidang perekonomian maupun di bidang pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau pada pasal 3 tujuan pendirian BUMNag adalah untuk meningkatkan perekonomian di nagari dan mengoptimalkan potensi sumberdaya potensial yang bisa dijadikan unit usaha BUMNag nantinya. Namun pada praktiknya Pemerintah Nagari Padang Tarok, belum bisa mendirikan BUMNag dikarenakan belum ada keseriusan untuk mendirikan BUMNag dengan dalih belum ada unit usaha potensial, namun sebenarnya banyak unit usaha potensial yang bisa dikembangkan tetapi pemerintah nagari belum serius begitu juga menerima aspirasi dan saran masyarakat.

4. Kapital Sosial dalam Realisasi BUMDes di Nagari Padang Tarok

Berdasarkan pemaparan peneliti terhadap Kendala-kendala dalam mendirikan BUMNag di Nagari Padang Tarok, peneliti mencoba menganalisis menggunakan teori kapital sosial menurut Robert M.Z Lawang. Dalam mendirikan BUMNag modal sosial merupakan sumberdaya potensial yg dapat digunakan oleh Pemerintahan Nagari Padang Tarok, karena dengan menggunakan modal sosial pemerintah nagari bisa menggali dan menemukan potensi yg ada pada masyarakat untuk mendirikan BUMNag. Hal ini bukan tanpa alasan karena kecenderungan masyarakat di nagari memiliki hubungan sosial yang kuat antara yang satu dengan yang lainnya, begitu juga dalam mencapai tujuan mendirikan BUMNag, karena masih menggunakan musyawarah dan mufakat dalam mencapai tujuan sehingga menguntungkan semua pihak.

Dalam teori modal sosial menurut Robert M.Z Lawang ada 3 unsur yg bisa menjadi tolak ukur dalam suatu keberhasilan yang mestinya harus ada dalam mendirikan BUMNag bagi pemerintahan nagari beserta lembaga nagari lainnya agar tujuannya dapat tercapai yaitu kepercayaan (*trust*), Jaringan sosial (*social network*) dan norma sosial.

Pertama adanya trust atau kepercayaan, adalah hubungan antara 2 orang atau lebih termasuk didalamnya adanya institusi yang diwakili orang yg berada dalam institusi tersebut. Dalam hal ini hubungan yang ada itu adalah Pemerintah Nagari Padang Tarok, Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lembaga Pemberdayaan Nagari (LPMN) Bundo Kanduang dan Tim perumus BUMNag Padang Tarok.

Dalam konteks perencanaan mendirikan BUMNag ini kepercayaan sudah mulai muncul dimana pemerintah nagari melakukan musyawarah dan mufakat untuk merencanakan pendirian BUMNag di Nagari Padang Tarok. pemerintah nagari selaku pemilik wewenang dalam mendirikan BUMNag memberikan kepercayaan kepada tim perumus yang diwakili oleh unsur tokoh masyarakat, yang mana setelah di sepakati bersama forum. Tugas dari tim perumus untuk mencari usulan

ide kepada seluruh masyarakat bagaimana terkait teknis dan unit usaha dari BUMNag Padang Tarok.

Pada dasarnya kepercayaan yg muncul adalah simbiotik unilateral, dimana kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Nagari Padang Tarok kepada tim perumus pendirian BUMNag dengan harapan proses pendirian BUMNag nantinya sudah mewakili ide dan usulan dari masyarakat. Sehingga dengan keterlibatan semua masyarakat melalui tim perumus di harapkan BUMNag dapat berdiri dan masyarakat bisa berperan aktif dalam pelaksanaannya, sehingga semua tidak ada yg dirugikan.

Setelah kepercayaan diberikan kepada tim perumus, maka tim perumus langsung untuk menjalankan tugas mencari ide unit usaha dengan musyawarah dengan seluruh masyarakat nagari. Seperti yang peneliti dapatkan informasi bahwa, dalam mencari ide unit usaha BUMNag ini cukup intens interaksi yg terjadi antara tim perumus dengan masyarakat, sehingga dengan adanya interaksi muncul beberapa ide unit usaha seperti yg di jelaskan di atas. Namun seiring berjalannya waktu, setelah tim perumus melaporkan hasil kerja kepada pemerintahan nagari terkait pendirian BUMNag maka tidak ada tanggapan dari pemerintah nagari dengan alasan pemerintah nagari sibuk menjalankan program nagari dan juga menurut pemerintah nagari usulan dari tim perumus tidak terlalu bagus untuk unit usaha BUMNag, sehingga kepercayaan mulai berkurang antara pemerintahan nagari kepada tim perumus begitu juga sebaliknya sehingga proses pendirian BUMNag berhenti pada tahun 2017.

Kedua yaitu jaringan sosial, adanya ikatan antara orang dan kelompok yang mana ikatan itu diikat dengan kepercayaan dan boleh juga dalam bentuk strategi ataupun dalam moralistik. Menurut teori modal Sosial, ikatan yang terbentuk itu harus kuat sehingga dapat terbentuk kerjasama yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks pendirian BUMNag Padang Tarok, jaringan sosial yang ada antara pemerintah nagari, tim perumus, BAMUS, KAN dan tokoh masyarakat lainnya harus kuat, sehingga dalam mencapai tujuan mendirikan BUMNag agar dapat tercapai, apabila suatu jaringan terganggu maka sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Namun pada praktiknya dalam mendirikan BUMNag di Nagari Padang Tarok jaringan yang ada tidak terikat kuat, antara satu kelompok ataupun lembaga tidak bersama dalam menjalankan peranannya dalam mendirikan BUMNag, atau bisa dikatakan sibuk dengan aktifitas sendiri dan tidak serius dalam mendirikan BUMNag.

Hal ini dapat dilihat setelah tim perumus menyerahkan hasil kerjanya kepada pemerintah nagari tidak ada tindak lanjut dari pemerintah nagari maupun dari lembaga lain, sehingga ketika menemukan kendala dalam mendirikan BUMNag seperti penentuan unit usaha dan pembebasan lahan terhadap unit usaha yang potensial semua jaringan yang ada tidak berperan aktif dan cenderung mendiamkan permasalahan tersebut yang berdampak tujuan yang diinginkan untuk mendirikan BUMNag tidak dapat tercapai.

Ketiga norma sosial, norma merupakan pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan yang dijalankan secara bersama yang bersumber dari agama, adat istiadat dan moralitas. Norma sosial berfungsi untuk mengontrol hubungan sosial antara individu dan kelompok dalam suatu entitas sosial tertentu yang mana

aturan tersebut tidak harus tertulis, namun dipahami oleh semua untuk saling bekerjasama dan menghargai orang lain dalam mencapai tujuan yang berdampak baik untuk merangsang kohesifitas sosial yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam proses pendirian BUMNag Padang Tarok norma sosial itu sendiri terbentuk pada saat acara diskusi perencanaan BUMNag. Pada saat diputuskan dari diskusi awal perencanaan pendirian BUMNag secara otomatis norma sosial dalam sebuah keputusan untuk mendirikan BUMNag sudah terbentuk dengan adanya tim perumus. Dengan adanya tim perumus maka peran masing-masing lembaga sudah mencapai tujuan mendirikan BUMNag di Padang Tarok, namun pada praktiknya norma-norma tersebut tidak dijalankan oleh semua pihak. Hal ini dapat dilihat dengan tidak berhasilnya tujuan mendirikan BUMNag di nagari padang tarok karena beberapa hal seperti intensitas pertemuan hanya 1 kali pada saat perencanaan awal pendirian BUMNag, tidak adanya tindak lanjut dari hasil kerja tim perumus bumnag dan tidak maksimalnya peranan semua pihak yang ada di Nagari Padang Tarok guna mencapai tujuan untuk mendirikan BUMNag Padang Tarok.

D. KESIMPULAN

1. Kendala-kendala dalam mendirikan BUMNag di Nagari Padang Tarok karena pemerintahan nagari beserta seluruh elemen masyarakat belum serius untuk mendirikan BUMNag, karena pendirian BUMNag belum menjadi prioritas pemerintahan nagari, karena program prioritas pemerintah nagari padang tarok lebih ke pembangunan fisik dan program pemberdayaan.
2. Trust hanya terbentuk di awal tetapi seiring berjalannya waktu dalam pendirian BUMNag kepercayaan antara pemerintah nagari kepada tim perumus mulai berkurang, begitu juga dengan jaringan sosial yang tidak kuat antara satu pihak dengan pihak lain sehingga semua tidak serius untuk mencapainya tujuan dan yang terakhir tidak di jalankannya norma sosial yang dibentuk secara bersama oleh semua lembaga dalam mencapai tujuan pendirian BUMNag.
3. Menurut peraturan menteri desa No. 4 tahun 2015 lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program BUMNag harus dimiliki nagari sendiri atau sekurang-kurangnya dapat disewa oleh nagari. Namun, kenyataannya lahan jalur sepeda gunung ini merupakan tanah ulayat yang tidak dapat dijual belikan. Sebenarnya ini bisa disiasati dengan cara menyewa tanah ini, tapi pihak dari pemilik tanah tidak mau melepaskan pengelolaan lahan ini untuk dijadikan BUMNag, karena mereka takut nantinya nagari memegang penuh atas pengelolaan jalur sepeda gunung yang sudah mereka bangun dari awal hingga sukses seperti sekarang. Oleh sebab itu BUMNag sampai saat ini tidak dapat didirikan karena lahan tidak bisa dimiliki atau di sewa oleh pihak nagari.
4. BUMNag didirikan untuk menunjang pendapatan masyarakat, mensejahterakan masyarakat bukan untuk menyaingi usaha masyarakat nagari, wilayah Nagari Padang Tarok didominasi oleh lahan yang digunakan warga untuk pertanian atau perkebunan, kalau unit usaha BUMNag bergerak dibidang petanian dan perkebunan nantinya akan mengganggu pendapatan para petani dan juga petani yang sudah termasuk kedalam kelompok tani, tujuan dari kelompok tanipun juga untuk meningkatkan pendapatan hasil pertanian selain itu, mencari lahan untuk lahan pertanian juga susah karena sebagian besar tanah yang ada di Nagari

Padang Tarok merupakan tanah ulayat yang tidak bisa diperjual belikan atau dihibahkan.

5. Mendirikan unit usaha dalam kegiatan ekonomi seperti membuka usaha *mini market*, foto *copy*, dan jenis usaha lainnya juga tidak bisa karena nantinya akan melemahkan pendapatan masyarakat yang mempunyai kedai-kedai kecil, masyarakat akan lebih cenderung berbelanja ke *mini market* ketimbang ke kedai karena *mini market* lebih lengkap produk yang dijual ketimbang di kedai.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia mengalokasikan waktunya selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada para dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan menjadi mentor selama pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Damsar dan Indrayani. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Fukuyama, Francis. 2008. The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial. Yogyakarta: Qalam
- Lawang, R.M.Z. 2005. Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar. Depok: Fosop UI Press
- Maryunani. 2008. Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George. 2010. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Douglas, J, Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwono, Teguh, 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru, Cloggaps Diponegoro University, Semarang.